

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu cara yang ditempuh Pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah terutama untuk daerah-daerah tertinggal termasuk pembangunan perdesaan adalah menerapkan sistem pembangunan desentralisasi dengan menggunakan sistem otonomi daerah, pada sistem otonomi daerah pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai hak dan wewenang untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan daerahnya dalam kegiatan pembangunan, dengan memasrahkan konsep pembangunan terhadap kepala daerah yang lebih mengetahui kondisi daerahnya diharapkan bisa mempercepat pembangunan daerah.

Disamping itu otonomi daerah terbentuk karena adanya kesadaran bahwa Indonesia adalah negara luas yang terdiri dari berbagai pulau, dengan adat, budaya dan kondisi sosial masyarakat yang berbeda, sehingga sulit menerapkan sistem pembangunan yang bersifat sentralistik. Kondisi sosial, adat, dan budaya masyarakat yang berbeda juga mempengaruhi gaya kehidupan sehari-hari masyarakat termasuk dalam kegiatan ekonomi sehingga pola pikir dan kebutuhan dalam kegiatan ekonominya juga berbeda dengan kondisi sosial masyarakat yang berbeda, seperti kondisi sosial masyarakat pedesaan yang berbeda dengan masyarakat perkotaan baik dari segi budaya dan sosial masyarakatnya, kondisi masyarakat desa masih tradisional dan kental dengan nilai-nilai budaya, adat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, kegiatan utama masyarakatnya dalam sektor ekonomi rata-rata pertanian. Berbeda dengan masyarakat desa, kondisi

sosial masyarakat kota lebih moderen dan kekinian dengan gaya hidup kekotaan, dan nilai-nilai budaya sudah mulai mengadopsi budaya luar, kegiatan ekonominya lebih ke arah industrialisasi, perbedaan-perbedaan tersebut juga terjadi pada daerah-daerah lain di Indonesia sehingga sistem otonomi daerah diharapkan bisa menjawab semua permasalahan tersebut dan mampu mempercepat pembangunan daerah dengan melihat kondisi dan kemampuan yang dimiliki daerah.

Dalam urusan pembangunan desa, Pemerintah telah memberikan hak dan wewenang terhadap Pemerintah Desa untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa secara mandiri, salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 isinya memberi pengakuan terhadap desa dengan keberagaman yang sudah ada dari sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut memberikan kejelasan status dan kepastian hukum terhadap status desa. Kepedulian pemerintah terhadap pembangunan desa lebih serius dan terfokus dengan memberikan anggaran secara khusus untuk pembangunan desa yang berupa dana desa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Adanya dana desa yang besar dan adanya pelimpahan hak dan wewenang secara keseluruhan terhadap pemerintah desa dalam urusan pembangunan desa diharapkan bisa mempercepat pembangunan desa dengan menjadikan masyarakatnya sebagai subjek utama dalam pembangunan desa.

Salah satu daerah yang memiliki sumber daya ekonomi melimpah dan memiliki sosial budaya yang banyak adalah Pulau Madura terutama Kabupaten

Bangkalan yang merupakan kabupaten pertama dan menjadi pintu masuk perekonomian madura dari gerbang tol Jembatan Suramadu. Dari segi peluang Kabupaten Bangkalan mempunyai peluang besar untuk mempercepat pembangunan dari pada kabupaten lain di Madura, karena Kabupaten Bangkalan yang paling besar mendapatkan dampak ekonomi dari adanya jembatan tol suramadu yang merupakan pintu masuk gerbang perekonomian madura, disamping itu Kabupaten Bangkalan memiliki sumber daya ekonomi yang melimpah terutama di sektor pertanian, namun hal tersebut belum memberikan dampak yang maksimal terhadap proses percepatan pembangunan, sampai saat ini Kabupaten Bangkalan masih berada pada katagori daerah tertinggal yang pembangunan ekonominya masih lambat, hal ini dapat dilihat dari segi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan.

Tabel 1.1
Data PDRB Bangkalan ADH Konstan 2010-2016 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)	Laju pertumbuhan PDRB (Dalam %)
2010	15,881,408.7	
2011	16,406,521.2	3,3
2012	16,173,679.4	-1,4
2013	16,204,006.3	0,2
2014	17,369,757.5	7,2
2015	16,906,844.5	-2,7
2016	17,018,646.6	0,7

Sumber: Bangkalan Dalam Angka 2017

Data diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan masih mengalami fluktuatif, PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2014 yakni sebesar 17,369,757.5 dan pertumbuhan PDRB sebesar 7,2 persen, pada tahun selanjutnya terus mengalami penurunan dan cenderung tidak stabil pada tahun 2015 pertumbuhannya menurun drastis ke -27 persen dan pada tahun 2016 pertumbuhannya pada 0,7 persen.

Sedangkan dari segi indeks pembangunan manusia Kabupaten Bangkalan masih tertinggal dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur, menurut peringkat yang dikeluarkan pemerintah Jawa Timur indeks pembangunan manusia Kabupaten Bangkalan berada di peringkat ke 37 dari total 38 kabupaten di Jawa Timur.

Tabel 1.2
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangkalan

Komponen IPM	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup Saat Lahir	Tahun	69,46	69,51	69,6	69,6	69,62	69,72	69,77	69,82
Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,16	10,56	10,67	10,96	11,17	11,55	11,56	11,57
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	4,29	4,59	4,89	4,9	5,07	5,08	5,13	5,14
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	000 Rupiah	6.709	7.006	7.316	7.434	7.459	7.667	8.030	8.192
Indeks Pembangunan Manusia		57,23	58,63	59,65	60,19	60,71	61,49	62,06	62,3
Pertumbuhan IPM	%		2,45	1,74	0,91	0,86	1,28	0,93	0,39

Sumber: BPS Jatim 2017

Indikator pembangunan manusia Kabupaten Bangkalan setiap tahunnya terus mengalami kenaikan seperti indikator angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2010 jumlah angka harapan hidup saat lahir 69,46 tahun dan terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2017 69,82 tahun. Namun dari segi laju pertumbuhan masih mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan, pertumbuhannya masih lambat, Pertumbuhan IPM (indeks pembangunan manusia) terbesar terjadi pada tahun 2010 yakni 2,45% sedangkan untuk tahun-tahun selanjutnya pertumbuhan IPM (indeks pembangunan manusia) terus mengalami penurunan, pada tahun 2011 sebesar 1,74% dan tahun-tahun selanjutnya terjadi fluktuatif dan mengalami penurunan sehingga masih tertinggal dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur.

Dari data pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia Kabupaten Bangkalan diatas menunjukkan bahwa kondisi pembangunan Kabupaten Bangkalan masih lambat dan tertinggal. Kekayaan sumber daya

ekonomi dan sumber daya alam belum mampu mempercepat pembangunan Kabupaten Bangkalan terutama pembangunan di tingkat perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa modal ekonomi saja masih kurang untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bangkalan dan perlu kebijakan-kebijak baru untuk mempercepat pembangunan tersebut, salah satunya memperhatikan peran modal kearifan lokal yang ada pada masyarakat yakni modal sosial, modal sosial sangat penting untuk dilibatkan dalam proses pembangunan terutama dalam pembangunan desa yang kondisi modal sosial masyarakatnya sangat kuat, terkenal dengan tradisional, budaya dan sosial masyarakatnya masih kuat.

Santosa dalam (Santosa, 2008), yang mengamati pengaruh budaya (*culture*) terhadap pembangunan, khususnya pembangunan desa, menunjukkan hasil bahwa budaya gotong royong yang terpengaruhi oleh sistem religi yang dianut dalam masyarakat (dalam hal ini kriteria yang digunakan adalah kriterianya *Clifford Geertz* yaitu abangan dan santri) menunjukkan bahwa pada wilayah penduduk tipe abangan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bersifat tradisional, masyarakat bekerja sama dalam mencari batu dan bekerja sama pula dalam mengerjakan pembangunan jalan. Sedangkan bagi penduduk tipe santri karena terpengaruh tradisi dagang Nabi yang lebih suka secara bersama menyumbangkan uang. Meskipun begitu, kegiatan gotong royong mencerminkan etos subsistensinya Scott dimana bagi golongan masyarakat dengan status sosial tinggi dapat meninggalkan kerja bakti dan tolong menolong, asal tahu diri, karena konsep tahu diri berdasarkan kesadaran

moral dapat mampat, sehingga berakibat pada munculnya kasus *white collar crime*.

Sedangkan menurut Kusumastuti (2015), dalam penelitiannya tentang modal sosial dan mekanisme adaptasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur desa berpendapat bahwa bentuk-bentuk modal sosial berupa kepercayaan, interaksi, dan kerja sama antara anggota kelompok menjadi kekuatan untuk merespon secara kolektif pembangunan infrastruktur pedesaan, upaya respon tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah kapasitas adaptif masyarakat.

Salah satu desa yang kondisi sosial masyarakatnya masih kuat dan kental adalah Desa Batokaban, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, kondisi sosial dan budaya masyarakat desa batokaban masih kental dan berbeda dengan masyarakat desa pada umumnya, kuatnya modal sosial tersebut terlihat dari kehidupan masyarakatnya yang masih tradisional, kompak dan gotong royong, saling membantu secara sukarela sesama tetangga, saling menghormati dan mempercayai antara satu dengan yang lain terutama terhadap yang lebih tua. Dari segi hubungan sosial masyarakatnya, masyarakat desa batokaban masih tertutup dan lebih melakukan interaksi sesama masyarakat desa saling berkunjung antara satu dengan yang lain dan saling menghormati antar sesama masyarakat desa, namun uniknya terdapat perbedaan antara hubungan interaksi dengan sesama masyarakat desa batokaban dan interaksi dengan masyarakat luar desa, ketika mereka berkomunikasi dengan masyarakat desa batokaban terutama keluarga dan kerabatnya mereka lebih terbuka dan saling berkomunikasi dengan baik namun ketika mereka berkomunikasi dengan

masyarakat yang tidak dikenal atau masyarakat baru yang bukan penduduk desa batokaban maka mereka lebih tertutup. Cara komunikasi yang tertutup tersebut merupakan salah satu ciri kebiasaan masyarakat madura sebagaimana pendapatnya Astutik dan Sarmini (2014) yang berpendapat bahwa masyarakat madura tergolong sebagai masyarakat tradisional karena memiliki sikap-sikap yang bersifat komunal dan kolektif, sulit melakukan komunikasi diluar pekerjaan.

Dalam konteks nilai-nilai kepercayaan dan kebiasaan, masyarakat desa batokaban masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya-budaya dan adat leluhurnya baik dari segi penghormatan atau cara menaruh kepercayaan, dimana dalam hal kepercayaan dan kepatuhan terhadap aktor mereka masih berpegang teguh pada semboyan dan filsafat orang madura yakni "*Buppa Babbu Guru ban Rato*" (Ayah, Ibu, Guru/kyai dan Pemimpin), masyarakat desa batokaban masih kuat dan berpegang teguh terhadap empat orang tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka masih berpegang teguh dan percaya terhadap *guru ngajih* (guru ngaji) yang merupakan tokoh agama desa yang selalu memberi pengetahuan dan arahan dalam masalah keagamaan dan pendidikan, masyarakat percaya dan patuh sepenuh hati terhadap *guru ngajih* (guru ngaji), melaksanakan semua saran dan anjurannya, dan meminta masukan untuk pendidikan anaknya. Masyarakat desa batokaban juga memegang teguh dalam kepercayaan dan kepatuhan terhadap pemimpin terutama terhadap kepala desa yang merupakan orang tua desa, dan terhadap tokoh masyarakat yang menjaga keamanan dan kekondusifan desa, mereka mempunyai kepercayaan besar kepada orang yang berperan penting terhadap desa termasuk dalam urusan

pembangunan desa, disamping itu kebiasaan masyarakat desa batokaban yang hanya ikut-ikutan terhadap orang yang lebih tahu dalam permasalahan desa, masyarakat menyebutnya dengan istilah *norok buntek* (*norok buntek* artinya hanya ikut-ikutan kepada orang yang lebih tahu). Dalam menaruh kepercayaan atau *norok buntek* (ikut-ikutan) masyarakat desa tidak sembarang percaya terhadap orang, orang yang memiliki gelar pendidikan tinggi belum tentu dipercayai dan diikuti perkataannya jika pembicaraan dan tingkah laku orang tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai kesopan dalam masyarakat, masyarakat batokaban lebih menjunjung tinggi adat dan budi pekerti.

Keadaan sosial masyarakat desa batokaban merupakan sebuah gambaran akan kekayaan dan kuatnya modal sosial yang dimiliki masyarakat desa di Madura. Modal sosial masyarakat desa batokaban jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik bisa saja menjadi pendorong dalam suksesnya proses pembangunan desa dan sebaliknya jika modal sosial tersebut tidak dimanfaatkan bisa saja menjadi penghambat dalam proses pembangunan.

Pentingnya memanfaatkan modal kearifan lokal yang berupa modal sosial masyarakat desa batokaban dalam pembangunan desa dan mengingat kurang maksimalnya kegiatan pembangunan yang hanya memanfaatkan sumber daya ekonomi saja maka penelitian tentang peran keterlibatan modal sosial dalam pembangunan desa sangat penting untuk diteliti dan dikaji lebih dalam.

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan diatas mengenai pembangunan desa dan kondisi modal sosial masyarakat desa batokaban maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni:

1. Bagaimana kondisi modal sosial masyarakat Desa Batokaban yang mendukung dalam pembangunan desa?
2. Bagaimana peran keterlibatan modal sosial dalam pembangunan Desa Batokaban, kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kondisi modal sosial masyarakat yang mendukung dalam pembangunan Desa Batokaban, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui kontribusi keterlibatan modal sosial dalam pembangunan desa Batokaban, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah dengan adanya penelitian diharapkan bisa memperdalam dan memperluas pengetahuan penulis pribadi dan para akademisi tentang pemahaman teori dan konsep modal sosial dalam pembangunan desa sehingga mampu memberikan sebuah pandangan baru mengenai konsep modal sosial dan pembangunan desa dan memberikan kontribusi yang besar dalam perkembangan ilmu ekonomi pembangunan.

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun manfaat praktisnya adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pertimbangan dasar mengenai pentingnya modal sosial dalam kebijakan pembangunan desa bagi pemangku kebijakan, dalam hal ini yang menjadi pengambil kebijakan adalah pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta instansi pemerintah lainnya yang berkaitan. Sedangkan manfaat bagi masyarakat desa, dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan bahan pembelajaran dan kesadaran akan pentingnya modal sosial dan perannya dalam pembangunan desa.